

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA. 018

TAHUN ANGGARAN 2023
(AUDITED)



bsip_jambi 

Jl. Samarinda, No. 11 Paal V 
Kota Jambi

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Jambi, 6 Mei 2024
Kepala Balai,

Dr. Salwati, SP, M.Si
NIP. 197303071998032001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - C.1.2. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Aset Lainnya
 - C.3.1. Aset Tak Berwujud
 - C.3.2. Aset Lain-lain
 - C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.4.2. Uang Muka dari KPPN
 - C.5. Ekuitas
 - C.5.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas

- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jambi, 6 Mei 2024
Kepala Balai,

Dr. Salwati, SP, M.Si
NIP. 197303071998032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 97.604.550,00 atau mencapai 62,11% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 157.148.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp 8.500.725.017,00 atau mencapai 96,70 % dari alokasi anggaran sebesar Rp8.792.113.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp31.798.441.938,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp23.552.250,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp31.774.649.688,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp240.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28.934.285,00 dan Rp31.769.507.653,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp97.569.400,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.081.410.520,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-9.983.841.120,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp63.035.150,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.920.805.970,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp33.287.193.156,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.920.805.970,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi

Antar Entitas sebesar Rp8.403.120.467,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp31.769.507.653,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	157.148.000,00	97.604.550,00	62,11	161.502.056,00
Jumlah Pendapatan		157.148.000,00	97.604.550,00	62,11	161.502.056,00
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3.778.500.000,00	3.745.219.849,00	99,14	5.502.226.464,00
Belanja Barang	B.4.	4.913.613.000,00	4.655.505.168,00	94,75	4.221.518.246,00
Belanja Modal	B.5.	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	50.173.385,00
Jumlah Belanja		8.792.113.000,00	8.500.725.017,00	96,70	9.773.918.095,00

II. NERACA

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
NERACA
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	23.552.250,00	84.032.250,00
Jumlah Aset Lancar		23.552.250,00	84.032.250,00
Tanah	C.2.1.	13.054.883.358,00	13.054.883.358,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	18.846.682.287,00	18.746.682.287,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	18.881.939.100,00	18.881.939.100,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	571.583.733,00	571.583.733,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	172.462.000,00	172.462.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-19.752.900.790,00	-18.224.709.572,00
Jumlah Aset Tetap		31.774.649.688,00	33.202.840.906,00
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	6.915.000,00	6.915.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-6.675.000,00	-6.595.000,00
Jumlah Aset Lainnya		240.000,00	320.000,00
Jumlah Aset		31.798.441.938,00	33.287.193.156,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	28.934.285,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		28.934.285,00	0,00
Jumlah Kewajiban		28.934.285,00	0,00
Ekuitas	C.5.	31.769.507.653,00	33.287.193.156,00
Jumlah Ekuitas		31.769.507.653,00	33.287.193.156,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		31.798.441.938,00	33.287.193.156,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	97.569.400,00	161.327.710,00
JUMLAH PENDAPATAN		97.569.400,00	161.327.710,00
KEGIATAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.	3.745.219.849,00	5.502.226.464,00
Beban Persediaan	D.3.	193.000.570,00	208.974.328,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.792.477.155,00	2.720.798.090,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	931.422.254,00	916.441.948,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	891.019.474,00	522.033.880,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.528.271.218,00	1.690.595.058,00
JUMLAH BEBAN		10.081.410.520,00	11.561.069.793,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-9.983.841.120,00	-11.399.742.083,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	63.035.150,00	149.424.346,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		63.035.150,00	149.424.346,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-9.920.805.970,00	-11.250.317.737,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	33.287.193.156,00	34.892.763.625,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-9.920.805.970,00	-11.250.317.737,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	32.331.229,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	8.403.120.467,00	9.612.416.039,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-1.517.685.503,00	-1.605.570.469,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	31.769.507.653,00	33.287.193.156,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi

BPSIP Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) Bogor.

Terbentuknya BPSIP Jambi berawal dari Balai Informasi Pertanian (BIP) Jambi yang semula merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Diklat Pertanian, kini menjadi unit kerja/UPT Badan Litbang Pertanian yang ditempatkan di daerah. Tanggal 1 April 1995, BIP Jambi berubah menjadi Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IPPTP) Jambi yang termasuk dalam wilayah kerja BPTP Padang Marpoyan Riau. Pada tahun 2001 IPPTP Jambi yang semula non eselon berubah menjadi BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) setingkat eselon tiga yang dikukuhkan oleh SK Mentan No. 350/Kpts/OT.210/6/2001 tanggal 14 September 2001. Sehubungan terjadinya perubahan tusi Badan Litbang Pertanian menjadi BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian), maka BPTP Jambi pun berubah menjadi BPSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) berdasarkan Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang berlaku sejak tanggal 30 Januari 2023. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, menurut Permentan No 13 Tahun 2023, BPSIP Jambi dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BPSIP Jambi dibantu oleh unit kerja Struktural (eselon IVa) yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kekuatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian diperlukan SDM yang handal, baik untuk kelompok jabatan fungsional maupun pelaksana (staf BPSIP). Selama ini melalui program peningkatan SDM, BSIP telah melaksanakan Training Jangka Panjang (program D3, S1, S2 dan S3) maupun Jangka Pendek (pendidikan dan pelatihan teknis). Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai agar mampu menjawab tantangan di lapangan dalam upaya pengembangan inovasi teknologi ke masyarakat.

Ketenagaan pada BPSIP Jambi hingga saat ini berjumlah 52 orang. Dalam mendukung kegiatan terdapat tenaga fungsional BPTP Jambi terdiri atas 2 (dua) orang Analis Prasarana Sarana Pertanian, 5 (lima) orang Pengawas Benih Tanaman, 1 (satu) orang pustakawan, 9 (sembilan) orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian, 7 (tujuh) orang penyuluh, 1 (satu) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) orang Analis Kepegawaian, 2 (dua) orang pejabat struktural, 19 (sembilan belas) orang tenaga administrasi dan 3 (tiga) orang PPPK yang mempunyai jabatan fungsional penyuluh.

Kelemahan

Dilihat dari jumlah pegawai yang ada di BPSIP Jambi, dan wilayah kerja BPSIP Jambi untuk Provinsi Jambi yang jarak antar kabupaten cukup jauh pula, maka pelaksanaan kegiatan belum optimal. Untuk dapat bekerja maksimal kiranya BPSIP Jambi perlu difasilitasi dengan sarana dan prasarana. Disamping itu tidak kalah pentingnya peningkatan SDM yang proporsional dengan tupoksi BPSIP Jambi melalui pendidikan jangka pendek, menengah dan panjang.

Capaian Kinerja

Dalam menjalankan tupoksinya, BPSIP Jambi dalam 1 tahun terakhir ini telah berhasil bekerjasama dengan Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dalam beberapa Program Pembangunan Pertanian. Beberapa kegiatan pada tahun ini adalah Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan (Pinang Batara), Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian, Taman Agrostandar, Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian, Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Pinang Batara), Perbenihan Padi 7 ton SS serta Bimbingan Teknis Perbenihan Padi.

VISI, MISI, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI dan SASARAN

Visi Kementerian Pertanian

Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian Pertanian

Untuk mencapai visi yang dicapai, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Berpedoman pada Permentan No. 13 Tahun 2023, Tugas & Fungsi BPSIP adalah:

Tugas

BPSIP melaksanakan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi.

Fungsi

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi

4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai

Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	129.938.000,00	129.938.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	25.200.000,00	25.200.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	2.010.000,00	2.010.000,00
Jumlah Pendapatan	157.148.000,00	157.148.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.062.965.000,00	3.589.716.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0,00	56.884.000,00
Belanja Lembur	78.250.000,00	131.900.000,00
Belanja Barang Operasional	1.377.210.000,00	1.382.085.000,00
Belanja Barang Non Operasional	271.488.000,00	863.328.000,00
Belanja Barang Persediaan	60.500.000,00	72.535.000,00
Belanja Jasa	519.275.000,00	670.300.000,00
Belanja Pemeliharaan	932.515.000,00	932.515.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	302.550.000,00	992.850.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	100.000.000,00
Jumlah Belanja	7.604.753.000,00	8.792.113.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp97.604.550,00 atau mencapai 62,11% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp157.148.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	25.200.000,00	44.031.000,00	174,73
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	129.938.000,00	51.626.400,00	39,73
Pendapatan Lain-Lain	0,00	35.150,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	2.010.000,00	1.912.000,00	95,12
Jumlah	157.148.000,00	97.604.550,00	62.11

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar -39,56% dibandingkan TA 2022 karena berkurangnya sumber PNBPN berupa penjualan hasil pertanian disebabkan perubahan Tusi dari Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	44.031.000,00	16.820.000,00	161,78
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	51.626.400,00	142.277.710,00	-63,71
Pendapatan Lain-Lain	35.150,00	174.346,00	-79,84
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.912.000,00	2.230.000,00	-14,26
Jumlah	97.604.550,00	161.502.056,00	-39,56

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp8.501.666.538,00 atau 96,70% dari anggaran belanja sebesar Rp8.792.113.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3.778.500.000,00	3.746.161.370,00	99,14
Belanja Barang	4.913.613.000,00	4.655.505.168,00	94,75
Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Total Belanja Kotor	8.792.113.000,00	8.501.666.538,00	96,70
Pengembalian Belanja		-941.521,00	0.00
Total Belanja	8.792.113.000,00	8.500.725.017,00	96,70

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -13,02% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai karena adanya pengurangan jumlah pegawai disebabkan perpindahan pegawai ke BRIN sebanyak 16 orang, pensiun sebanyak 1 orang dan meninggal dunia 1 orang walaupun terdapat penambahan 3 (tiga) orang PPPK.
2. Sehubungan dengan adanya peralihan Tusi BPTP ke BPSIP, banyak anggaran yang diblokir dan baru dibuka pada bulan April 2023 sehingga penyerapannya belum maksimal.
3. Masih diblokirnya anggaran belanja kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi sebesar Rp 200.000.000,00 sampai akhir tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	3.746.161.370,00	5.502.577.308,00	-31,92
Belanja Barang	4.655.505.168,00	4.221.518.246,00	10,28
Belanja Modal	100.000.000,00	50.173.385,00	99,31
Total Belanja	8.501.666.538,00	9.774.268.939,00	-13,02

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.746.161.370,00 dan Rp5.502.577.308,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar -31,93% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pengurangan jumlah pegawai yang disebabkan perpindahan ke BRIN sebanyak 16 orang pada pertengahan tahun 2022, pensiun sebanyak 1 orang dan meninggal dunia 1 orang pada tahun 2023. Meskipun demikian juga terdapat penambahan pegawai PPPK sebanyak 3 orang.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.560.669.138,00	5.351.667.308,00	-33,47
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	53.788.232,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	131.704.000,00	150.910.000,00	12,73
Jumlah Belanja Kotor	3.746.161.370,00	5.502.577.308,00	-31,92
Pengembalian Belanja Pegawai	-941.521,00	-350.844,00	168,36
Jumlah Belanja	3.745.219.849,00	5.502.226.464,00	-31,93

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.655.505.168,00 dan Rp 4.221.518.246,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,28% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan pagu perjalanan dinas sebesar Rp 469.450.000,00 dibanding TA. 2022
2. Adanya kenaikan pagu belanja jasa sebesar Rp 225.100.000,00 dibanding TA 2022

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.379.458.668,00	1.400.992.264,00	-1,54
Belanja Barang Non Operasional	781.592.300,00	896.271.500,00	-12,80
Belanja Barang Persediaan	69.460.000,00	58.241.000,00	19,26
Belanja Jasa	602.491.902,00	428.560.520,00	40,59
Belanja Pemeliharaan	931.482.824,00	915.419.082,00	1,75

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	891.019.474,00	522.033.880,00	70,68
Jumlah Belanja Kotor	4.655.505.168,00	4.221.518.246,00	10,28
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.655.505.168,00	4.221.518.246,00	10,28

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp50.173.385.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 99,31% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pengadaan Sarana Laboratorium Standardisasi berupa alat-alat laboratorium sebanyak 5 unit.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	50.173.385,00	99,31
Jumlah Belanja Kotor	100.000.000,00	50.173.385,00	99,31
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	100.000.000,00	50.173.385,00	99,31

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp50.173.385.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 99,31% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pengadaan Sarana Laboratorium Standardisasi berupa alat-alat laboratorium sebanyak 5 unit.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	50.173.385,00	99,31
Jumlah Belanja Kotor	100.000.000,00	50.173.385,00	99,31

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (Audited)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	100.000.000,00	50.173.385,00	99,31

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.552.250,00 dan Rp84.032.250,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Suku Cadang	23.552.250,00	23.552.250,00
Bahan Baku	0,00	60.480.000,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	23.552.250,00	84.032.250,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.054.883.358,00 dan Rp13.054.883.358,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	13.054.883.358,00
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	13.054.883.358,00

Tidak ada Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.846.682.287,00 dan Rp18.746.682.287,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	18.746.682.287,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	100.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	18.846.682.287,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-16.505.351.947,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.341.330.340,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa pembelian :

1. Centrifuge (Alat Laoratorium Pertanian) sebanyak 1 buah senilai Rp.22.490.000,00
2. Magnetic Stirer (Alat Laboratorium Pertanian) sebanyak 1 buah senilai Rp.5.151.000,00
3. Muffle Furnace sebanyak 1 buah senilai Rp.34.250.000,00
4. Oven (Alat Laboratorium Pertanian) sebanyak 1 buah senilai Rp.22.500.000
5. Shaker (Alat Laboratorium Pertanian) sebanyak 1 buah senilai Rp15.609.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.881.939.100,00 dan Rp18.818.939.100,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp571.583.733,00 dan Rp571.583.733,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp172.462.000,00 dan Rp172.462.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-19.752.900.790,00 dan Rp-18.224.709.572,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	18.846.682.287,00	-16.505.351.947,00	2.341.330.340,00
2.	Gedung dan Bangunan	18.881.939.100,00	-2.989.004.456,00	15.892.934.644,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	571.583.733,00	-258.544.387,00	313.039.346,00
4.	Aset Tetap Lainnya	172.462.000,00	0,00	172.462.000,00
Akumulasi Penyusutan		38.472.667.120,00	-19.752.900.790,00	18.719.766.330,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.915.000,00 dan Rp6.915.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	800.000,00
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.915.000,00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-6.675.000,00 dan Rp-6.595.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.915.000,00	-6.675.000,00	240.000,00
Akumulasi Penyusutan		6.915.000,00	-6.675.000,00	240.000,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28.934.285,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Barang yang masih harus dibayar	28.934.285,00	0,00
Jumlah	28.934.285,00	0,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp31.769.507.653,00 dan Rp33.287.193.156,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp97.569.400,00 dan Rp 161.327.710,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	33.990.000,00	123.525.000,00	-72,48
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.086.400,00	18.377.710,00	-12,47
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.550.000,00	375.000,00	313,33
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	44.031.000,00	16.820.000,00	161,78
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.552.000,00	250.000,00	520,80
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan IPTEK	360.000,00	1.980.000,00	-81,82
Jumlah	97.569.400,00	161.327.710,00	-39,52

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya berasal dari :

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berupa penjualan sayur-sayuran dan beras
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas pegawai BPSIP Jambi.
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi berasal dari sewa Guest House;
4. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya berasal dari layanan dan pengujian analisis laboratorium terpadu
5. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya berasal dari kunjungan ke Taman Agro Standar
6. Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan IPTEK berasal dari penjualan kambing boerka

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO merupakan Pendapatan yang diakui pada saat pendapatan dicatat (basis akrual) sedangkan Pendapatan pada LRA merupakan pendapatan yang diakui pada saat diterima (basis kas). Perbedaan Pendapatan pada LRA dan LO sebesar Rp 35.150,- berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.745.219.849,00 dan Rp5.502.226.464,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.409.784.500,00	3.326.242.060,00	-27,55
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.257,00	41.357,00	-14,75
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	153.520.010,00	217.000.070,00	-29,25
Beban Tunj. Anak PNS	39.954.750,00	50.788.572,00	-21,33
Beban Tunj. Struktural PNS	20.880.000,00	21.960.000,00	-4,92
Beban Tunj. Fungsional PNS	382.150.000,00	981.960.000,00	-61,08
Beban Tunj. PPh PNS	11.551.870,00	64.104.265,00	-81,98
Beban Tunj. Beras PNS	121.955.280,00	155.485.740,00	-21,56
Beban Uang Makan PNS	368.350.950,00	476.454.400,00	-22,69
Beban Tunjangan Umum PNS	51.545.000,00	57.280.000,00	-10,01
Beban Gaji Pokok PPPK	35.598.000,00	0,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	912,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.186.600,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	237.320,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	6.400.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.448.400,00	0,00	0,00
Beban Uang Makan PPPK	8.917.000,00	0,00	0,00
Beban Lembur	131.704.000,00	150.910.000,00	-12,73

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Jumlah	3.745.219.849,00	5.502.226.464,00	-31,93

Beban Pegawai diberikan kepada ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK yang berjumlah 52 pegawai/ 122 jiwa.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp193.000.570,00 dan Rp208.974.328,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	69.520.570,00	146.730.000,00	-52,62
Beban persediaan bahan baku	123.480.000,00	62.244.328,00	-54,03
Jumlah	193.000.570,00	208.974.328,00	-7,22

Beban persediaan konsumsi yang berupa ATK dan Komputer Supplies. Beban persediaan bahan baku berupa benih UPBS.

Jumlah realisasi belanja barang persediaan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 69.460.000,00. Nilai beban persediaan per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp. - 123.540.570,00. Atas selisih tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Saldo awal senilai Rp. 60.480.000,00
- Perolehan lainnya/ UPBS senilai Rp. 63.000.000,00
- Belanja barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai persediaan barang konsumsi senilai Rp. 60.570,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.792.477.155,00 dan Rp2.720.798.090.,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.220.526.805,00	1.219.491.211,00	0,08
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.011.816,00	4.324.890,00	-7,24
Beban Honor Operasional Satker	113.861.000,00	141.144.000,00	-19,33
Beban Barang Operasional Lainnya	39.000.000,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	2.059.047,00	31.005.969,00	-93,36
Beban Bahan	722.386.300,00	619.184.500,00	16,67
Beban Honor Output Kegiatan	1.800.000,00	35.025.000,00	-94,86
Beban Barang Non Operasional Lainnya	57.406.000,00	242.062.000,00	-76,28
Beban Langganan Listrik	304.047.738,00	293.902.748,00	3,45
Beban Langganan Telepon	14.629.258,00	13.561.269,00	7,88
Beban Langganan Air	12.519.306,00	31.648.500,00	-60,44
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	96.489.900,00	67.238.003,00	43,51
Beban Sewa	29.498.500,00	1.485.000,00	1.886,43
Beban Jasa Profesi	89.400.000,00	18.400.000,00	385,87
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	2.325.000,00	-100,00
Beban Jasa Lainnya	55.907.200,00	0,00	0,00
Jumlah	2.792.477.155,00	2.720.798.090,00	1,57

Beban barang terdiri dari beban barang operasional dan beban barang non operasional. Beban barang operasional terdiri dari beban honor operasional satuan kerja, beban keperluan perkantoran, beban pengiriman surat dinas pos pusat, beban barang operasional lainnya dan beban barang operasional-penanganan pandemi Covid 19. Beban barang non operasional terdiri dari beban bahan, beban barang non operasional lainnya, dan beban honor output kegiatan. Beban jasa terdiri dari beban jasa profesi, beban langganan listrik, beban langganan telepon, beban langganan air, beban langganan daya dan jasa lainnya, beban sewa dan beban Jasa-Penanganan pandemi Covid 19.

Terdapat Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 yang berasal dari belanja lisensi aplikasi untuk penyelenggaraan Online/Video Conference.

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.763.542.870,00. Beban barang dan jasa per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp.-28.934.285,00. Selisih ini berupa Belanja barang/jasa yang masih harus dibayar. Belanja barang tersebut berupa langganan listrik, langganan air, langganan telepon dan langganan WIFI untuk pemakaian bulan Desember 2023 yang masih harus dibayar pada Januari 2023

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp931.422.254,00 dan Rp916.441.948,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	443.227.550,00	416.006.500,00	11,48
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	477.745.620,00	488.739.012,00	-7,40
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	10.449.084,00	11.696.436,00	24,56
Jumlah	931.422.254,00	916.441.948,00	2,56

Beban Pemeliharaan terdiri dari :

1. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan yang berupa pemeliharaan gedung laboratorium, pemeliharaan halaman gedung kantor, pemeliharaan guest house, pemeliharaan interior rumah jabatan, pemeliharaan halaman rumah jabatan dan pemeliharaan gedung kantor;
2. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pemeliharaan komputer dan notebook, pemeliharaan AC Split, pemeliharaan mesin genset, pemeliharaan mesin ketik, pemeliharaan kendaraan roda 4, pemeliharaan kendaraan roda 3, pemeliharaan kendaraan roda 2 dan pemeliharaan alsintan;
3. Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan berupa barang persediaan yang digunakan untuk pemeliharaan

Jumlah realisasi belanja pemeliharaan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 931.482.824,00. Nilai beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 jika dibandingkan

dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp. - 60.570,00. Selisih ini merupakan beban persediaan untuk pemeliharaan yang belanjanya menggunakan akun persediaan dan pada Laporan Operasional dicatat sebagai persediaan barang konsumsi.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp891.019.474,00 dan Rp522.033.880,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	825.169.474,00	490.756.680,00	68,14
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.850.000,00	16.355.000,00	302,63
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	14.922.200,00	-100,00
Jumlah	891.019.474,00	522.033.880,00	70,68

1. Beban Perjalanan Biasa dari perjalanan pelaksanaan kegiatan dan monitoring;
2. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota dari perjalanan pelaksanaan kegiatan di dalam kota yang waktunya kurang dari 8 (delapan) jam

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.528.271.218,00 dan Rp1.690.979.960,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	999.260.100,00	1.161.583.964,00	-13,97
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	496.578.665,00	494.368.281,00	0,45
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	17.436.333,00	17.436.333,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	7.669.404,00	10.264.666,00	-25,28
Beban Penyusutan Jaringan	7.246.716,00	7.246.716,00	0,00
Beban Amortisasi Paten	80.000,00	80.000,00	0,00
Jumlah	1.528.271.218,00	1.690.979.960,00	-9,62

Penyusutan dilakukan tiap semester

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	63.000.000,00	149.250.000,00	-57,79
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	35.150,00	174.346,00	-79,83
Jumlah	63.035.150,00	149.424.346,00	-57,82

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari :

1. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya berasal dari hasil panen kegiatan UPBS yang masuk ke gudang persediaan benih
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berasal dari pengembalian uang makan pegawai tahun 2022

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.287.193.156,00 dan Rp34.892.763.625,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-9.920.805.970,00 dan Rp-11.250.702.614,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.403.120.467,00 dan Rp9.612.416.039,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.500.725.017,00
Diterima dari Entitas Lain	-97.604.550,00
Jumlah	8.403.120.467,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-97.604.550,00 sedangkan DKEL sebesar Rp8.500.725.017,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-31.769.507.653,00 dan Rp-33.254.477.050,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada bulan Januari 2024, Utang kepada pihak ketiga senilai Rp 28.934.285,00 berupa Belanja Barang yang masih harus dibayar telah dibayar kepada pihak ketiga.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

DIPA TA.2023 BPSIP Jambi mengalami revisi sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi ke-1 tanggal 26 Desember 2023 berupa blokir anggaran teknis terkait perubahan tusi.
2. Revisi ke-2 tanggal 15 Februari 2023 dengan jumlah pagu tetap. Revisi dilakukan untuk pemutakhiran Halaman III DIPA.
3. Revisi ke-3 tanggal 10 April 2023, dengan jumlah pagu bertambah menjadi Rp 8.479.753.000. Revisi dilakukan karena ada penambahan anggaran kegiatan teknis terkait tusi baru, penambahan belanja modal, pembukaan blokir dan cut off.
4. Revisi ke-4 tanggal 15 April 2023 dengan jumlah pagu bertambah menjadi Rp 8.699.753.000. Revisi dilakukan untuk penambahan dana perbenihan.
5. Revisi ke-5 tanggal 17 April 2023 dengan pagu tetap. Revisi dilakukan untuk pemutakhiran halaman III DIPA.
6. Revisi ke-6 tanggal 7 Juli 2023 untuk revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA. Pagu tetap.
7. Revisi ke 7 tanggal 2 Agustus 2023 berupa revisi POK. Pagu tetap.
8. Revisi ke 8 tanggal 11 September 2023 berupa revisi gaji PPPK dan menghapus akun penanganan pandemi COVID-19. Pagu tetap.
9. Revisi ke 9 tanggal 15 September 2023 berupa Tambahan Anggaran untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Standar Instrumen Pertanian . Pagu bertambah menjadi Rp 9.099.753.000,-.
10. Revisi ke 10 tanggal 10 Oktober 2023 berupa revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA dengan pagu tetap.
11. Revisi ke 11 tanggal 31 Oktober 2023 berupa pengurangan belanja pegawai sehingga pagu menjadi Rp 8.837.038.000,-.
12. Revisi ke 12 tanggal 24 November 2023 berupa refocusing anggaran. Pagu bertambah menjadi Rp 8.910.651.000,-.
13. Revisi ke 13 tanggal tanggal 7 Desember 2023 berupa revisi gaji dan layanan lainnya dengan pagu tetap.

14. Revisi ke 14 tanggal 19 Desember 2023 berupa penghapusan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP. Pagu turun menjadi Rp 8.792.113.000,-.

Sejak tahun 2019 telah terjadi wabah pandemi Covid-19 di dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2023 terdapat anggaran Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19, dengan penggunaan sebagai berikut :

Anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk operasional pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan satker. Pagu Rp Rp2.275.000,00 dengan realisasi 90,51% atau senilai Rp2.059.047,00. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Diseasea 2019 (Covid-19) di Indonesia, maka Dirjen Perbendaharaan melalui Surat Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023, meminta satker untuk melakukan revisi atas akun belanja khusus Covid-19. BPSIP Jambi telah melakukan revisi akun tersebut dan tertuang dalam DIPA revisi ke 8 tanggal 11 September 2023.

Tabel Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid -19
Per 31 Desember 2023

KD SATKER	KD KEGIATAN	KD OUTPUT	AKUN	NM AKUN	REVISI DIPA	ANGGARAN	BELANJA	SISA	PENGGUNAAN BELANJA *Merujuk pada SE DJPB.0369_2 020
634001	6918	994	521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	9	1.275.000	1.272.172	2.828	- Belanja Lisensi Aplikasi Untuk Penyelenggaraan Online/Video Conference
634001	1809	994	521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19		1.000.000	786.875	213.125	- Belanja Lisensi Aplikasi Untuk Penyelenggaraan Online/Video Conference

Sehubungan dengan perpindahan jabatan fungsional peneliti dan litkayasa ke jabatan fungsional lain Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Prasarana Sarana Pertanian dan Pengawas Benih Tanaman maka sampai dengan tanggal pelaporan terdapat selisih berupa kelebihan pembayaran tunjangan jabatan senilai Rp 173.950.000,00. Kelebihan ini akan dikembalikan oleh pejabat fungsional yang bersangkutan pada tahun 2024 dan akan dicatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Sedangkan untuk kekurangan

tunjangan fungsional akibat perpindahan tersebut, telah dibayarkan kepada pegawai pada bulan September Tahun 2023.

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh BPSIP Jambi, sebagai berikut :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, memiliki beberapa output strategis berupa :
 - a. Satu Dokumen Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Komoditas Pinang Betara
 - b. 430 (empat ratus tiga puluh) orang yang terdiseminasikan Standar Instrumen Pertanian yang terdiri dari Petani dan Kelompok Wanita Tani (KWT)
 - c. Satu Lembaga Penerap Standar yang didampingi yaitu masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pinang Betara yang juga menjadi Lembaga penerap SNI:01-3450-1997 biji pinang bukan obat
 - d. Lima unit Sarana Laboratorium Standardisasi yang terdiri dari Centrifuge, Magnetic Stirer, Muffle Furnace, Oven dan Shaker
2. Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas yang memiliki output strategis berupa benih padi sebanyak 11 unit (11 ton)
3. Program Dukungan Manajemen, memiliki beberapa output strategis berupa :
 - a. Satu Layanan Perkantoran BPTP Jambi (sebelum perubahan nama satker)
 - b. Satu Layanan BMN
 - c. Satu Layanan Umum
 - d. Satu Layanan Perkantoran BPSIP Jambi
 - e. 94 (Sembilan puluh empat) orang penerima Layanan Manajemen SDM yang terdiri dari ASN, PPNPN dan anggota Dharma Wanita Persatuan BPSIP Jambi
 - f. Satu Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - g. Satu Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - h. Satu Layanan Manajemen Keuangan